

Pertarungan Islam Global dalam Dinamika Politik Indonesia Pasca Reformasi

Mohamad Firdaus¹, Arief Hidayat²

Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta,

*² Program Doktor Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta
mohamadfirdauz11@gmail.com*

Abstrak

Tulisan ini hendak membahas mengenai pertarungan Islam global dalam dinamika politik Indonesia pasca reformasi. Perjalanan Islam sebagai agama dari jazirah arab menimbulkan banyak perubahan lansekap di negara-negara lain yang menerimanya sebagai ajaran sebuah agama baru. Konteks Islam global disini mengacu pada adanya penyebaran agama Islam secara universal dengan menembus batas teritorial negara lainnya. Appadurai menyebutkan bahwa globalisasi membawa adanya perubahan pada aras sosio kultural masyarakat dengan menyebarnya pandangan tentang ruang (scape). Dalam praktiknya, universalisme islam ini mendapat beragam perlakuan. Di Indonesia khususnya, arah Islam sebagai ajaran dan lembaga terbagi menjadi pecahan yang sangat multi. Dua besar diantaranya masuk dalam aliran "Islam puritan" dan "Islam kultural". Mereka yang masuk dalam Islam puritan cenderung pada tafsir lateral mengikuti "kebudayaan asal Islam", sedangkan yang lebih kultural telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif tekstual dengan menggunakan instrumen tinjauan pustaka yang relevan. Kesimpulan artikel ini didapatkan bahwa globalisme Islam yang ada di Indonesia tidak hanya masuk sebagai agama baru, namun telah menjelma menjadi kekuatan yang digunakan untuk menaklukkan sendi-sendi perikehidupan sosial, politik dan kultural yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Globalisasi, Islam, Politik Lokal, Indonesia

Abstract

This paper aims to discuss the global Islamic struggle in Indonesia's post-reform political dynamics. The journey of Islam as a religion from the Arabian Peninsula has caused many landscape changes in other countries that accept it as a new religion. The context of global Islam here refers to the universal spread of Islam by penetrating the territorial boundaries of other countries. Appadurai states that

globalization brings changes to the socio-cultural level of society by spreading the view of space (scape). In practice, this Islamic universalism receives various treatments. In Indonesia in particular, the direction of Islam as a teaching and institution is divided into various fragments. The two major ones are “puritan Islam” and “cultural Islam”. Those who belong to puritan Islam tend to lateral interpretations following the “original culture of Islam”, while those who are more cultural have been adapted to the situation and conditions of society. This article uses a textual qualitative research method using relevant literature review instruments. The conclusion of this article is that Islamic globalism in Indonesia has not only entered as a new religion, but has been transformed into a force used to conquer the social, political and cultural life in Indonesia.

Keywords: *Globalization, Islam, Local Politics, Indonesia*

Pendahuluan

Secara historis periode Islam mengalami perubahan pada paruh abad ke-20, yaitu sejak berakhirnya Perang Dunia II. Berakhirnya Perang Dunia II menandai berakhirnya kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Barat (Eropa). Disamping itu, dengan adanya kemerdekaan dan kebebasan negara baru di Asia dan Afrika itu, terjadi gelombang besar perpindahan populasi Asia-Afrika ke Eropa. Disnilah kemudian kunci adanya migrasi besar dari negara yang dulunya merupakan wilayah jajahan menjadi bagian dari masyarakat dunia, khususnya di Eropa. Islam sebagai agama tua dan menyebar di hampir seluruh wilayah jazirah Arab, mampu diterima oleh wilayah lain di Asia, khususnya Asia Tenggara. Sementara itu, meskipun Islam memiliki pemeluk yang mayoritas, namun kekuatan Islam ini belum masuk dalam ranah sosial politik yang lebih kompleks. Hadirnya Islam belum mampu menandingi ideologi

Barat yang mencengkeram hampir seluruh dunia. Di samping itu, pasca perang Dunia kedua dunia secara praktis terbagi dalam dua blok besar yang saling berhadapan, yaitu Blok Barat dengan motor Amerika Serikat dan sekutunya yang liberal vis a vis Uni Soviet dengan jargon komunismenya.

Dekolonialisasi yang dirasakan negara dengan penduduk muslim ini dihadapkan pada dilema baru perteruung ideologi yang ada ini. Eropa dan Amerika Serikat (AS) dianggap sebagai kiblat ke-modern-an, dan membawa perspektif baru yang lebih terbuka. Praktis pada titik ini, Islam sebagai agama yang dikenal universal dan memiliki jangkauan melewati wilayah asalnya hanya mampu bergerak pada wilayah-wilayah yang lebih terbatas (privat), dan belum mampu menjangkau hadirnya Islam sebagai kekuatan politik yang mumpuni.

Dalam konteks negara bangsa yang modern ini, Islam dianggap sebagai salah satu ajaran

agama yang bersifat ideologis dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk poros kekuatan politik. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi corak dan struktur pemerintahan yang dijalankan setidaknya dianggap sesuai dengan syari'at Islam. Dalam perkembangan Islam ini setidaknya muncul berbagai gerakan yang mendasarkan dirinya pada nilai-nilai Islam, meskipun ada juga para pemeluk Islam yang tidak berpihak pada Islam sebagai suatu kekuatan Ideologis. Mereka inilah yang kemudian dianggap sebagai bagian dari kelompok Islam kultural. Mereka yang masuk dalam kelompok kultural ini, tidak mengikatkan diri pada Islam sebagai Ideologi gerakan, namun menyimpannya sebagai sebuah keyakinan yang transenden. Oleh sebab itu, golongan ini berada pada spektrum ideologi liberal, sosialis bahkan komunis. Di Indonesia seperti yang dikenal dulu ada berbagai partai Islam yang ikut dalam Pemilu pertama tahun 1955. Partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (P-NU), harus berkompetisi dengan partai nasionalis seperti PNI dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Di Turki misalnya, terjadi gerakan Islam dengan dimotori oleh Partai AKP (Adalet ve Kalkma Partisi) yang bercorak Islamis, dan memenangkan pemilihan umum, setelah mengalahkan rezim sekuler di bawah Kemal Attaturk (Eickelmen, 1998).

Pertarungan Islam yang dikenal sebagai suatu ajaran mampu memberikan perubahan yang berarti dibanyak tempat. Dari adanya parta-partai Islam yang muncul di negara-negara yang pada awalnya merupakan koloni Eropa justru seolah membalik adanya perlawanan hegemoni Barat yang cenderung sekuler. Disisi yang lain, Islam juga berhadapan dengan budaya asli karakter setiap bangsa yang berbeda-beda, bahkan dalam perkembangannya Islam politik memiliki rival yang bukan hanya mereka yang bercorak liiberal namun juga kelompok lain yang lebih lokal .

Beberapa artikel yang senada dengan topik artikel ini misalnya yang pernah diangkat oleh Umar (2016). Umar mengulas mengenai gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir di mana gerakan ini mampu menyediakan wacana dan artikulasi gerakan Islam secara universal. Universalitas Islam yang diangkat oleh gerakan Ikhwan adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai dasar negara, khususnya di Mesir. Keberhasilan Ikhwanul Muslimin mengantarkan Muhammad Moersi sebagai Presiden Mesir adalah salah satu kesuksesan gerakan ini dalam memasarkan Ideologi berbasis agama yang mereka miliki. Namun gerakan Islamisasi politik yang terdapat di Indonesia justru terus mengalami kegagalan, hal ini menurut umar karena masih kuatnya aliran politik dengan paham kebangsaan yang ada di Indonesia.

Penelitian berikutnya misalnya yang pernah ditulis oleh Nu'ad (2016). Nu'ad menjelaskan bahwa krisis pada tahun 1997 membuat momentum bagi kemunculan Islam politik di Indonesia. Krisis tersebut tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh negara, membuat kepekaan sosial, politik, dan ekonomi global telah tumbuh dalam masyarakat Islam, dan mewujud dalam bentuk ide, pikiran, ekspresi, dan tindakan yang direpresentasikan oleh individu atau kelompok, dalam tataran progresif, direpresentasikan oleh aktivis gerakan individu di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, SI, al-Wasliyah, DDII, LDII, MMI, FPI, HTI, MT, dan Jamaah Tabligh. Nu'ad menjelaskan bahwa aktivisme Islam harus dikategorikan kembali dengan mempertimbangkan maraknya gerakan-gerakan Islam dan perbedaan karakter gerakan-gerakan Islam, baik baru maupun lama, terutama dalam hal aktualisasi politik praktis.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif tekstual (Larasati, 2013). Dalam penelitian tekstual, objek material dan praktik sosial menjadi objek utama, dalam rangka mengonstruksi teks dengan konteks, sebagai bentuk representasi ideologi sebagai analisisnya. Dalam penelitian ini sumber utama yang dirujuk adalah buku literatur, dan artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan topik Islam politik,

globalisasi sebagai kultur dunia modern tanpa sekat, serta lokalitas dalam konteks perpolitikan Indonesia. Sumber data tersebut kemudian didialogkan, dikontekstualisasikan, serta dianalisis berdasarkan teori yang ada, dan selanjutnya diambil kesimpulan sekaligus sebagai penutup.

Pembahasan

Globalisasi dan Ideologi Islam

Globalisasi tidak lain merupakan artikulasi persoalan sejarah manusia (Aulya, 2020). Dalam perkembangannya, globalisasi ini turut membawa rasio kapitalisme dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Efek secara langsung yang dirasakan adalah terjadinya peminggiran budaya asli diganti dengan budaya baru (Aulya, 2020). Masuknya globalisme secara evolutif pada abad ke-21 mengubah tatanan sosial masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dengan adanya pemahaman yang lebih Islamis di bandingkan dengan era sebelumnya. Disisi yang lain Ritzer dan Dean Meligat memandang bahwa globalisasi sebagai suatu proses lintas wilayah yang menyebabkan meningkatnya kecairan dan tumbuhnya benda, barang, arus manusia, tempat serta informasi multi arah (Ritzer dan Dean, 2013). Dalam pemahaman definisi ini globalisasi dalam fenomena keagamaan berarti munculnya corak keagamaan yang lebih menekankan pada adanya identitas cair yang baru,

sebagai simbol adanya reaksi globalisasi.

Term globalisasi sendiri muncul pada tahun 1962 dan di publikasikan dalam artikel di majalah *Spectator*

(www.newworldencyclopedia.org). Kemudian pada tahun 1962, McLuhan menggunakan kata tersebut pada bukunya yang berjudul *The Gutenberg Galaxy* (Aulya, 2020). *The Oxford English Dictionary* memuat istilah “Globalism” dalam edisi tahun 1986 sebagai kosa kata yang lebih baru. Secara teoretik globalisasi merupakan sebuah artikulasi wacana di era postmo sebagai diskursus yang dinamis.

Melihat globalisasi dan Islam sebagai sebuah agama, sejatinya sudah terkandung makna globalisasi itu sendiri. Dalam Islam memang telah terkandung makna universal, meskipun turunnya agama Islam sendiri di wilayah Arab. Artinya disini, Islam sebagai agama dan budaya baru membawa misi “homogenisasi kultural” yang menyebabkan adanya perubahan pada budaya inti yang ada pada masyarakat (Feally, 2017). Semakin adanya penerimaan Islam sebagai agama dan kultur mayoritas membawa dampak adanya cengkeraman pengaruh Islam. Disisi yang lain, ada pula terjadinya hibridisasi kultural yang menekankan pada percampuran identitas global-lokal (glokal) yang melahirkan kultur hibrida. Heterogenitas yang tercipta

dengan adanya global-lokal ini membawa kultur dan identitas baru.

Appadurai menjelaskan bahwa unsur globalisasi mencakup lima hal (Appadurai, 1996), yaitu: pertama, *ethnoscape* (orang), yang termasuk didalamnya turis, pengungsi, imigran, pekerja, tamu) yang memainkan peran penting pada oerubahan di tempat kita tinggal. Kedua, *technoscape* (teknologi). Hal ini merupakan konfigurasi global dari teknologi yang bergerak dengan kecepatan tinggi melintas batas. Secara harfiah tidak ada lagi batasan geografis seiring dengan perkembangan teknologi ini. Ketiga, *financescape* (modal). Modal terlibat sebagai mesin untuk memantapkan dan menjalankan misi. Keempat, *mediascape* (gambar). Hal ini mencakup berbagai upaya peningkatan penyebaran informasi melalui media. Kelima, *ideoscape*, yang mencakup adanya pertukaran gagasan atau ide yang semakin multi atau mengglobal.

Secara praktis, Islam telah menggunakan *scape* yang ada sebagai sebuah nilai yang saling terpaut satu sama lain. Dalam praktik inilah kemudian Islam bukan hanya dipandang sebagai agama global, namun juga merupakan sebuah kultur global yang menyebar keseluruhan penjuru dunia, sebagai sebuah laku baru secara ideologis.

Modernisasi Islam sebagai Kekuatan Politik

Dalam dimensi Islam secara ideologis, memiliki berbagai orientasi dalam menghadapi adanya modernisme pasca kolonialisme ini. Setidaknya ada empat orientasi pemikiran yang ada diantaranya: Fundamentalis (radikal-puritan), tradisional-konservatif, reformis-modernis, dan sekuler-liberal. Kelompok fundamentalis pada prinsipnya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh golongan tradisional (Jaenuri, 2002), dan menganggapnya sebagai sesuatu yang bid'ah. Tokoh pemikir fundamentalis islam yang terkenal adalah Ibnu Taymiyyah, yang wafat pada tahun 1328.

Gerakan radikal puritan menjadi tonggak lahirnya gerakan Wahhabiyyah, di bawah Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1787). Gerakan ini dikenal sebagai tandingan dari adanya penilaian kemerosotan nilai Islam dalam masyarakat. Gerakan ini mengajak pada adanya pemaknaan Islam yang hakiki dan murni. Kelompok ini juga menghendaki adanya ajaran Islam yang murni tanpa campur tangan pemikiran dalam menentukan hukum agama (ijtihad), serta menolak ajaran filsafat (Rahman, 1979).

Dibelahan negara lain juga muncul gerakan yang sama misalnya di Pakistan dengan nama Jama'at Islam. Tokoh utama gerakan ini adalah Al-Maududdi (1903-1979). Di Mesir ada Ikhwanul Muslimin dengan tokohnya Sayyed Qutb dan

Hasan al-Banna, sementara di Indonesia muncul Muhammadiyah dengan tokohnya KH. Ahmad Dahlan (1868-1923), meskipun pada akhirnya beliau dikenal sebagai tokoh yang modernis dan reformer (pembaharu) Islam (Lubis, 1993).

Kelompok tradisional-konservatif merupakan pihak yang menentang terjadinya arus westernisasi (pembaratan) yang terjadi akibat imperialisme. Kelompok ini biasanya didukung oleh para ulama salaf dan banyak dianut oleh masyarakat kelas bawah dan penduduk yang bermukim di desa-desa (rural) (Makhmudah, 2015).

Kelompok reformis-modernis memandang Islam sangat sesuai dengan kehidupan yang ada, bahkan pada urusan yang privat. Dalam hal ini pandangan tradisional yang kontra pada perubahan dan cenderung memegang teguh tradisi tidak boleh dibiarkan, karena akan menghambat kemajuan. Praktik kultural ini perlu mendapatkan sentuhan dari otoritas yang ada sehingga akan kembali pada khittah Islam yang merupakan rahmat bagi semesta alam dan selalu sesuai dengan perkembangan jaman. Pemikiran reformis dan modern ini tidak lahir begitu saja, namun merupakan perpaduan dari adanya sentuhan pemikiran Barat yang dianggap lebih modern, rasional dan liberal (Esposito, 2002).

Kelompok modernis yang banyak mengadopsi pemikiran barat ini kemudian berkembang menjadi sebuah ideologi yang menyatakan

bahwa Islam tidak bertentangan dengan modernitas atau perkembangan jaman. Mereka pun menginterpretasikan ajaran Islam yang ada sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat yang berkembang (Esposito, 1999). Para Islam modernis ini menganggap bahwa ajaran Islam sangat fleksibel dan berkelanjutan, bahkan menerima filsafat sebagai salah satu cara untuk menggali pengetahuan yang sebelumnya ditentang oleh kelompok puritan.

Kecenderungan modernisasi pandangan Islam berkembang pada abad ke-19, dengan beberapa tokoh yang terkenal misalnya yang berasal dari Mesir; Jamaluddin Afgani (1839-1898), M. Abduh (1849-1905), Rashid Ridhlo (1865-1935) serta dari India; M. Iqbal (1876-1938) serta Sayyid ahmad Khan (1817-1898) (Hadiz, 2018). Hal yang menjadi pembeda kelompok ini terletak pada bahwa yang pertama masuk ke ranah intelektual, sementara yang selanjutnya berada di wilayah politik praktis. Kelompok sekuler lebih menekankan pada adanya urusan agama secara personalistik dan menjadikan kekuatan logika dalam kehidupan publik. Secara ideologis kelompok ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran barat yang berpahan nasionalisme.

Rivalisme Islam dan Barat

Peristiwa 11 September 2001 merupakan sebuah titik tolak penting babak baru hubungan Islam dan Barat secara dramatik. Aksi terorisme dengan meledakkan dua gedung menara kembar WTC (World Trade Center) di Amerika Serikat membawa konsekuensi yang luas tentang jatuhnya hubungan ini (Mudzakkir, 2016). Tragedi itu menjustifikasi hadirnya benturan peradaban Islam-Barat secara kasat mata, yang memunculkan adanya paham rivalitas terbuka. Di saat yang sama, banyak negara dengan mayoritas masyarakat Islam, sedang sangat akrab dengan demokrasi yang merupakan produk Barat. Gelombang demokrasi yang melanda negara-negara Asia, khususnya Timur Tengah dan Asia membawa konsekuensi serius dalam praktik pemerintahan mereka. Di sama itu pula Orde Baru tampil dengan wajah demokratik, meskipun dalam sistem bernegara dan berpemerintahan jauh dari kata demokratis. Secara prosedural Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia jika menilik dari adanya kapital jumlah penduduk muslim di Asia.

Sementara itu, di dunia Arab, terjadi gelombang demokratisasi dengan jargon populisme Islam. Populisme Islam di arab sendiri kemudian disebut dengan istilah Arab Spring (musim semi Arab) (Hadiz, 2018). Awal mula populisme

Islam hiruk-pikuk politik yang terjadi semasa kolonialisme modern telah memunculkan varian gerakan perjuangan komunitas Muslim yang sangat beragam. Meskipun demikian, kemunculan gerakan-gerakan itu relatif memiliki tujuan yang serupa. Di bawah panji-panji Islam, gerakan perjuangan tersebut lahir sebagai sebuah ekspresi kritik atas ketidakadilan yang lahir dari rangkaian aktivitas ekonomi politik globalisasi dan neo-liberalisme. Termarginalisasi dalam sebuah sistem politik global membuat komunitas-komunitas Muslim itu, setidaknya, memiliki satu persamaan: tertindas. Hal tersebut pada gilirannya melahirkan corak populisme Islam model baru sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Lewat praktik kolonialisme, dominasi dan hegemoni negara-negara barat atas dunia Muslim memunculkan fase awal populisme Islam.

Ketimpangan antar kelas sosial menjadi satu produk spesiëk yang lahir dari rahim sistem politik yang hegemonik saat itu. Dominasi satu budaya atas budaya lainnya melahirkan banyak kalangan yang akhirnya terpinggirkan. Kalangan borjuasi cilik (*petty bourgeoisie*) di dunia Muslim, yang posisinya tidak begitu diuntungkan sistem politik kolonialisme, pun posisinya nyaris di ujung tanduk. Indonesia, Turki dan Mesir bahkan juga mempunyai pengalaman serupa, sehingga, untuk berjuang melawan dominasi kolonial Barat sebagai sebuah komunitas

muslim global (*ummah*), di bawah naungan satu khalifah, menjadi satu hal yang sulit diwujudkan. Namun, ini bukan berarti komunitas muslim tersebut takluk dan tunduk terhadap sistem yang ada.

Perjuangan memperoleh keadilan, persamaan sosial dan kebebasan dari belenggu kolonialisme terus berlangsung. Pada pengalaman Indonesia dan Mesir, gerakan-gerakan yang mengusung ide-ide lama populisme Islam itu bahkan berhasil menjangkau kelas-kelas pekerja dan bahkan berjumpa dengan gerakan-gerakan antikolonial dan gerakan nasionalis yang umumnya berasal dari kalangan borjuis dan aristokrat. Disinilah embrio koalisi kelas sosial yang tergabung dari beragam struktur kelas mulai terbentuk. Mereka disatukan oleh beberapa persamaan seperti pedihnya terpinggirkan sistem dan punya angan-angan untuk membangun sebuah negara-bangsa (*nation-state*) modern di masa mendatang. Di fase awal ini, mimpi-mimpi yang berbasiskan hukum Islam (*Sharia-based visions*), sebagaimana jamak ditemui dipopulisme Islam model baru, cenderung samar-samar (Hadiz, 2011).

Kemunculan Ikhwanul Muslimin di Mesir ataupun kelompok Tarbiyah di Indonesia pada tahun 1970-an, misalnya, menjadi kendaraan bagi kelompok-kelompok Muslim yang termarginalkan oleh sistem. Populisme Islam pada tahun-tahun

tersebut arahnya mulai bergeser pada aktivisme politik Islam yang berniat mengganti sistem negara yang tengah dikuasai oleh rezim otoriter. Bahkan, untuk kasus Indonesia, permusuhan tidak hanya diarahkan negara tapi juga diarahkan ke etnis Tionghoa karena dianggap sebagai ancaman bagi kalangan borjuasi cilik Muslim di Indonesia dan etnis penguasa sumber-sumber ekonomi. Selain itu, pada beberapa kasus yang terjadi di Mesir dan Indonesia, organisasi Islam yang vokal kerap berkoalisi dengan kelas pekerja. Pada 1946-1947, Ikhwanul Muslimin, sebagai contoh, bahkan turut mendirikan perusahaan kecil yang bergerak di bidang tekstil guna menolong masyarakat di kelas pekerja supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka (Hadiz,2018). Sehingga, pertolongan tersebut berdampak pada kesan positif di masyarakat luas bahwa dalam naungan Islam, kelas pekerja pun turut diperhatikan. Inilah pondasi-pondasi awal yang menyusun populisme Islam model baru. Aliansi antar kelas (cross-class alliance) mulai terbentuk secara perlahan di bawah panji-panji Islam. Islam menjadi entitas persatuan dalam melawan sekelompok yang dianggap sebagai musuh, baik secara ideologis maupun secara politis.

Islam sebagai sebuah agama, menisbahkan sendiri mengakomodir adanya pluralisme. Nilai pluralisme ini merupakan salah satu indikator masyarakat demokrasi. Sebagian

sarjana muslim yang bersentuhan dengan Barat, relatif aktif mengkampanyekan adanya persamaan nilai-nilai demokrasi dan Islam. Meskipun disisi yang lain ada juga kelompok Islam yang tidak mengendaki adanya demokrasi sebagai pedoman. Meskipun demikian, sebenarnya rivalitas yang terjadi antara Islam-Barat tidak menyentuh segala aspek, ada aspek lain yang juga dinegosiasikan sebagai langkah kompromi. Di Indonesia misalnya tidak danya corak negara Islam, tidak menerapkan syariat Islam dalam hukum positifnya, dan juga membebaskan seluruh pandangan (ideologi) selama tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia.

Islam Politik Indonesia

Titik perjumpaan antara modernitas Barat dan Islam menghasilkan setidaknya tiga hal; pertama, sekularisme, kedua, reformisme dan ketiga, Islamisme (Hadiz,2012). Kalangan reformis berpendapat bahwa kemajuan Barat dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mereformasi Islam ke arah yang lebih baik. Sedangkan kalangan sekuler menganggap bahwa agama tidak boleh berperan secara publik, dan masuk ke ranah yang lebih individual. Pendapat kalangan Islamis justru menghendaki adanya integrasi nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Pandangan terakhir ini menjadi antitesis adanya segala sesuatu yang berasal dari Barat, dan

menganggap semua yang berasal dari Barat itu merupakan ajaran yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Islamisme merupakan istilah yang di asosiasikan dengan sebuah sistem pemikiran holistik yang tidak hanya berkaitan dengan ajaran agama sebagai benteng moral dan ritual, namun telah menjelma menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikannya sebagai dasar negara (ad Daulah). Hal ini merujuk pada adanya keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara beserta penerapan hukumnya dalam kehidupan bernegara. Di kemudian hari Islamisme ini merupakan sebuah persoalan baru di era modern yang berposisi bukan hanya sebagai antitesis Barat namun telah menjadi nilai tersendiri yang dikehendaki oleh para kelompok Islam yang merindukan kejayaan Islam di masa lalu (Bruinessen, 2002).

Di Indonesia, Islamisme sendiris ebenarnya telah berjalan cukup lama, bahkan di era awal kemerdekaan. Beberapa partai politik yang berhaluan Islam muncul sebagai antitesis partai dengan haluan kanan dan kiri. Meskipun demikian Islamisme lebih dikenal di Indonesia pasca Orde Baru runtuh dan juga tragedi global serangan teror 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam namun corak Islam yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan Islam yang ada di dunia Arab.

Sejarah Indonesia modern

mencatat lahirnya Syarekat Islam (SI) yang merupakan organisasi pertama yang menjadikan Islam sebagai identitas kolektif politik. Syarekat Islam mendapatkan dukungan yang luas dari para pedagang kaya yang ada di Pulau Jawa, karena melihat perkembangan pedagang dari Cina yang semakin berkembang dan dekat dengan pemerintah kolonial. Di saat kemerdekaan bahkan muncul gerakan radikal yang mencoba meneguhkan Islam sebagai dasar negara melalui gerakan Darul Islam/ Negara Islam Indonesia (DI/NII). Organisasi DI/NII secara eksplisit menghendaki adanya Daulah Islam di Indonesia. Pada akhirnya gerakan ini ditumpas dengan ditangkapnya tokoh utama gerakan ini yaitu Karto Soewirjo. Secara politik juga muncul partai dengan ideologi Islam pertama yang ada di Indonesia, yaitu Masyumi.

Pada Pemilu tahun 1955 Masyumi mendapatkan suara sebesar 20,92 persen untuk legislatif dan 22,3 Persen untuk konstituante. Kuatnya dukungan terhadap Masyumi ini memang tidak terlepas dari adanya politik internasional yang memandang Presiden Soekarno yang lebih pro-Cina dan Uni Soviet. Pertalian diantara keduanya tidak disukai oleh Barat yang secara ideologis bertentangan dengan kedua negara komunis tersebut. Akhirnya, Islam dapat dikatakan bersenyawa dengan Barat untuk dapat menandingi kekuatan politik Soekarno.

Tabel Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Islam dalam Pemilu

Pemilu	Partai	Suara (%)
1955	Masyumi, NU, PSII, PERTI, PPTI, dan AKUI	43,9%
1971	NU, Parmusi, PSII, PERTI	27,1 %
1977	PPP	29,3%
1982	PPP	27,8 %
1987	PPP	16,0%
1992	PPP	17,0 %
1997	PPP	22 %
1999	PPP, PBB, PK, PKNU, PP, PPI Masyumi, PSII, PKU KAMI, PUI, PAY, PIB, SUNI, PSII 1905, PMB dan PID	17,8 %
2004	PKB, PAN, PKS, PBB, PPP, PNU Indonesia, PBR	38,39 %
2009	PKB, PAN, PKS, PBB, PPP	25,9%
2014	PKB, PAN, PKS, PBB, PPP	30,42
2019	PKB, PAN, PKS, PBB, PPP	30,05

Sumber: Djuyandi dkk (2022)

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kelompok Islam politik juga tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Setidaknya dari Pemilu tahun 1977 sampai dengan 1997 partai yang mewadai umat Islam dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) eksis dengan suara yang tidak signifikan (lihat tabel). Kondisi ini memang tercipta karena politik fusi Orde baru yang menghendaki tidak banyaknya partai politik dan hanya menyisakan 2 (dua) partai yaitu PPP dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia), dan satu Golongan Karya

(Golkar) (Lay,2006). Pada Pemilu Pasca reformasi praktis partai dengan haluan Islam kembali mekar dengan banyaknya partai yang ada, misalnya PPP, PBBPK, PKNU, PP, PPI, Masyumi, PSII, PKU KAMI dan seterusnya. Namun karena adanya ambang batas parlemen pada saat itu sebesar 2,5 persen partai Islam tersebut berguguran karena tidak mampu melampauinya. Sampai dengan Pemilu 2019 praktis hanya tersisa 5 partai Islam yaitu PKB, PAN, PKS, PBB dan PPP. Meskipun secara ideologis sebenarnya PKB dan Pan lebih ke arah nasionalis religius dan bukan Islam tulen.

Melihat dari perolehan suara yang tidak signifikan ini dapat dijelaskan bahwa partai Islam tidak mampu memberikan atau menarik kans pemilih dari golongan lainnya, sehingga angka perolehan suaranya tidak lebih hanya menyentuh angka 30 persen secara kumulatif. Posisi ini menunjukkan bahwa gerakan Islam politik tidak begitu besar mendapatkan simpati masyarakat dan hanya sebagian kecil saja yang menghendaki adanya penerapan Ad-din wa Daulah.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan mengenai pertarungan Islam global dalam dinamika politik lokal. Pertama, bahwa Islam sebagai agama masuk dalam sebuah kancah pertarungan ideologis yang bersifat kenegaraan. Bahwa globalisme seperti yang disampaikan oleh Ritzer (2013) dan Appadurai (1996) membawa dampak yang luas bukan hanya sebagai homogenisasi, namun juga merupakan sebuah penyebaran ideologi dengan berbagai perangkat yang dimilikinya. Kondisi ini membawa kebudayaan lokal menjadis emakin terpinggirkan. Disisi yang lain, Islam sebagai budaya global, memiliki lawan tanding yaitu liberalisme yang berasal dari barat yang dianggap modern.

Kedua, kemenangan Eropa dan Amerika Serikat atas perang dunia,

melahirkan revivalisme Islam yang bukan hanya sebagai Ideologi baru yang besifat A-din wa Addaulah, namun juga melahirkan pemiliran baru sebagai pertemuan Barat-Islam (glokalisasi) yang menciptakan berbagai pemikiran Islam diberbagai negara dengan penduduk mayoritas Islam yang memperoleh kemerdekaan pada tahun 1940-an. Ketiga, di Indonesia secara lebih lokal pertarungan Ideologi besar dunia itu pun masuk dalam tatanan politik, sosial, kebudayaan dan berbagai lapangan kehidupan masyarakat. Bahkan pertarungan yang kuat justru muncul dalam lingkaran Islam sendiri dimana sebagian pihak menghendaki adanya Islam sebagai landasan bernegara dalam bentuk syariat dan sebagian yang lain tetap mempertahankan ideologi kebangsaan dengan berlandaskan nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Terlepas dari semua itu, bahwa Islam global dan dinamika politik lokal di Indonesia berjalan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan sampai saat ini terbukti bahwa Islam politik bukan merupakan kelompok mayoritarian yang ada, sehingga konteks pahan lokal dan kebangsaan Indonesia tetap mampu dipertahankan dalam posisi yang relatif lebih cair.

Daftar Pustaka

Appadurai, Arjun. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimension of Globalization*. London:

- University of Minnesota Press
 Aulya, Aidil. (2020). *Filosofi Sosiologis Globalisasi Dan Pembentukan Identitas Keagamaan: Interpretasi Gerakan HTI*. *Jurnal Al-Aqidah. Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, Volume 12, Edisi 1, Juni 2020
- Bruinessen, Martin van. (2002). *Genealogies of Islamic Radicalism in post- Soeharto Indonesia*. *Jurnal South East Asia Reserach*, Vol. 10, No. 2.
- Dyuyandi, Yusa. Dkk. (2022). *Citra Partai Islam dalam Dinamika Politik Diajang Pemilu 2019*. *Jurnal Muqoddimah*, Vol. 6, No. 2.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori. (1998). *Ekspresi Politik Muslim*. Bandung: Mizan.
- Esposito, John L., dan Voll, John O. (1999). *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan.
- Esposito, Jhon L. (2002). *Modernisme*, *Ensiklopedia Oxford*; *Dunia Islam Modern* terj. Eva Y. N dkk. Bandung: Mizan.
- Fealy, Greg dan Bubalo, Anthony. (2007). *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Hadiz, V. R. (2011). *No Turkish delight: The impasse of Islamic party politics in Indonesia*. *Indonesia*, (92), 1-18.
- Hadiz, Vedi R., dan Robison, Richard. (2012). *Political Economy and Islamic Politics: Insight from the Indonesian Case*. *Jurnal New Political Economy*, Vol. 17, No. 2, 2012.
- Hadiz, Vedi R. (2018). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Jakarta: LP3ES
- Jaenuri, Ahmad. (2002). *Ideologi Kaum Reformis*. Surabaya: LPAM
- Larasati, A. C. (2020). *Analisis Tekstual Representasi Nilai Sosial dalam Buku Cerita Legenda Robin Hood Karya Peter Holeinone (Perspektif Analisis Cultural Studies)*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(3), 204-212.
- Lay, Cornelis. (2006). *Involusi Politik: Esai-Esai Transisi Indonesia*. Yogyakarta: Polgov
- Lubis, Arbiyah. (1993). *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Makhmudah, Siti. (2015). *Dinamika dan Tantangan Masyarakat Islam di Era Modernisasi (Pemikiran Dan Kontribusi Menuju Masyarakat Madani)*. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Volume 1, Nomor 2, September 2015
- Mudzakkir, Amin. (2016). *Islam dan Politik di era Kontemporer*. *Jurnal Episteme*, Vol. 11, No. 1 Juni 2016.
- Nu'ad, I. A. (2016). *Gerakan Islam*

Konteks Lokal dan Global;
Respon Pemikiran Sosial
Politik dan Ekonomi Aktivis
Gerakan Islam di Indonesia. *El-
Hikam*, 9(1), 43-62.

Rahman, Fazlur. (1979). *Islam:
Challenges and Opportunies;
Past Influence and present
Challenge*. Edinburgh:
Edinburgh University Press.

Ritzer, George and Paul Dean.
(2013). *Globalisasi: The
WileyBlackwell Companion to
Sosiologi*. edited by G. Ritzer.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Umar, A. R. M. (2016). *Dari Negara
Islam ke Politik Demokratis:
Wacana dan Artikulasi Gerakan
Islam di Mesir dan Indonesia*.
Jurnal Masyarakat Dan Budaya,
18(1), 1-18.